

STUDI KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN BERWAWASAN KEBANGSAAN

**Oleh
Mamat Supriatna
(PPB – FIP – UPI)**

Abstract: Entering global and modern age. Indonesia as a country of which its pluralistic citizen is expanding needs to state clearly of national education regulation. We should avoid the challenges, which block and make difficult the life like competition, friction of value orientation, change of life pattern and paradigm. The situation occurs in all sorts of life aspects. To face the challenge requires the reliable and ready human resources to overcome the change of nature and living without desisting or having the human being who are fond of learning in their life. In this case, education trusted as institution should use the strategic development for certifiable human resources as needed to fill the life in the future.

Kata kunci: Bhineka, diskursus, global, hayat, horizon, internalisasi, karakteristik, kebangsaan, dan wawasan.

Studi ini dilatarbelakangi oleh pendadaran peristiwa dan analisis produk kebijakan yang menunjukkan pentingnya pendidikan berwawasan kebangsaan. Permasalahan yang tampak mencuat ke permukaan dan perlu diperoleh solusinya lebih menegaskan bahwa wawasan kebangsaan yang majemuk belum meragasukma secara terpadu dalam setiap diri warga negara Indonesia sehingga pola kehidupan dan pergaulan antar sesama warga negara mudah disulut oleh potensi perbedaan.

Sementara itu kemajemukan atau keragaman etnik merupakan salah satu kenyataan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Apabila keragaman itu terikat oleh tali silaturahmi yang berwawasan kebangsaan, maka keragaman itu menjadi identitas potensial dan modal yang tangguh dalam percaturan hidup global dengan bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bila keragaman itu tidak terikat kuat, maka perpecahan bangsa menjadi risiko kehidupan yang memperlemah identitas bangsa itu sendiri.

Pengkajian yang komprehensif dalam bentuk studi dipandang perlu dan mendesak untuk dilakukan, terutama ditujukan untuk membuka peluang lahirnya pedoman pendidikan berwawasan kebangsaan. Pendidikan diasumsikan sebagai sektor esensial dan strategis dalam kerangka mengembangkan potensi warga negara Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Dengan lahirnya suatu pedoman yang melandasi penyelenggaraan pendidikan, maka generasi mendatang diharapkan lebih menunjukkan paham, rasa dan semangat kebangsaan yang lebih kokoh dan kuat, sehingga dapat menunjang bangunan identitas bangsa Indonesia yang majemuk.

Pemasalahan utama yang perlu segera dijawab adalah: Seperti apa rumusan pedoman pendidikan berwawasan kebangsaan itu? Untuk menjawab

permasalahan tersebut, studi ini diselenggarakan dengan menggunakan strategi pengkajian substansi dan implementasi kebijakan pendidikan yang berwawasan kebangsaan. Pengkajian substansi ialah penelaahan yang sistematis dan efektif tentang isi dokumen kebijakan tentang pendidikan berwawasan kebangsaan. Pengkajian implementasi ialah kegiatan studi lapangan tentang pelaksanaan pembinaan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan berwawasan kebangsaan dalam bentuk: (1) identifikasi permasalahan-permasalahan yang realistis; (2) menjangkau masukan yang positif tentang pengembangan program; (3) penemuan kecenderungan aspirasi masyarakat tentang program pendidikan berwawasan kebangsaan yang bersifat tekstual, kontekstual dan kontraktual; dan (4) penyusunan acuan atau pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan .

Matra wawasan kebangsaan yang dijadikan objek telaahan meliputi matra: (1) paham kebangsaan, (2) rasa kebangsaan dan (3) semangat kebangsaan. Matra paham kebangsaan merupakan refleksi dari kesadaran individu (peserta didik) akan ke-bhinnekatunggalika-an masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk. Refleksi kesadaran ini dilandasi oleh pemahaman yang dalam akan kondisi geografis, latar belakang sejarah, pandangan hidup, kesenian, dan bahasa Indonesia. Keseluruhan landasan tersebut hendaknya menjadi fasilitas bagi peserta didik dalam bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya. Matra paham kebangsaan dalam studi ini lebih difokuskan pada Hak Asasi Manusia yang menunjukkan persepsi atau pandangan atas perbedaan-perbedaan sebagai gagasan yang manusiawi, bukan untuk dipertentangkan atau dipertajam; melainkan untuk diterima dengan penuh kesadaran satu bangsa Indonesia.

Matra rasa kebangsaan dimaksudkan dimensi kesadaran yang bersifat apresiatif (menerima dan menghargai) atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal-usul keturunan dan suku bangsa, tetapi tetap mengekspresikan perasaan yang sama sebagai bangsa Indonesia. Matra rasa kebangsaan terfokus pada perdamaian dalam kehidupan antar sesama, walaupun berhadapan dengan perbedaan-perbedaan keadaan diri yang tidak mungkin dihindarkan. Perdamaian sebagai indikator esensial dalam matra rasa kebangsaan terangkum dalam perilaku yang mau menerima dan menghargai perbedaan itu.

Matra semangat kebangsaan dimaksudkan sebagai dinamika perilaku yang atraktif yang diwujudkan dalam perbuatan senasib-sepenanggungan, toleransi, tenggang rasa, saling menghormati dan sanggup berkompetisi secara sehat serta menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain di dunia ini. Matra semangat kebangsaan difokuskan pada indikator demokrasi, baik dalam bersikap maupun berperilaku yang dinamis dan atraktif. Di dalam indikator demokrasi tidak menutup kemungkinan untuk tercipta kondisi kompetitif dan menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Metode

Disain studi yang dikembangkan bertitik tolak dari latar belakang analitis atas produk kebijakan dan peristiwa empirik kemudian difokuskan pada substansi

dan implementasi pendidikan berwawasan kebangsaan melalui penggunaan metode studi dokumentasi, seminar dan lokakarya serta studi lapangan dengan melibatkan subjek studi tokoh masyarakat, masyarakat pendidikan, cendekiawan, organisasi sosial politik dan pejabat departemen agama di 12 propinsi sampel . Secara matrik disain studi tergambar sebagai berikut.

Tabel I Desain studi kebijakan tentang pendidikan berwawasan kebangsaan

	Latar belakang	Fokus studi		Metode	Objek	Subjek
1	Produk kebijakan	Substansi dan implementasi pendidikan berwawasan kebangsaan	1	Studi dokumentasi	-Pandangan dan kebijakan tentang kebangsaan -Identifikasi permasalahan realitas -Masukan positif -Kecenderungan aspirasi	-Dokumen -Tomasy, cendikia, masydik, sospol, depag, kepsek, guru, siswa
			2	Seminar dan lokakarya		
			3	Studi lapangan		
			A	Diskusi terfokus		
			B	Kuesioner		
2	Peristiwa atau kondisi empirik		B	Observasi		
			c	terarah		

Disain tersebut melandasi kostruk studi yang ditujukan untuk menghasilkan deskripsi tentang: (1) Arah kebijakan pendidikan berwawasan kebangsaan; (2) Perspektif aspirasi masyarakat; (3) Kondisi objektif lembaga pendidikan; (4) Kecenderungan wawasan kebangsaan guru dan siswa SLTP; dan (5) Pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan.

Hasil

Deskripsi tentang hasil studi dokumentasi dan lapangan bertitktolak dari segi; (1) Arah kebijakan pendidikan berwawasan kebangsaan; (2) Perspektif aspirasi masyarakat; (3) Kondisi objektif lembaga pendidikan; dan (4) Kecenderungan wawasan kebangsaan guru dan siswa SLTP.

1. Arah Kebijakan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan

Dokumen-dokumen mutahir yang memuat kebijakan di bidang pendidikan tampak lebih mengarah kepada penguatan akan keberadaan sistem pendidikan nasional. Dimulai dari pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian disusul dengan peraturan-peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar dan menengah, merupakan fakta otentik yang mengisyaratkan hasrat luhur dari bangsa Indonesia untuk berupaya merengkuh keberadaan yang legal atas sistem pendidikannya.

Artinya, bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintah dan para wakilnya di lembaga legislatif telah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, " Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" dan " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang,” baru diwujudkan setelah hampir setengah abad merdeka.

Makna lebih dalam dari pernyataan di atas adalah bahwa sebelum peringatan kemerdekaan yang ke-50 negara Republik Indonesia, pendidikan bangsa ini belum diatur dengan produk kebijakan yang komprehensif dan sistematis. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa secara faktual sistem pendidikan nasional pada dekade 50-an sampai dengan 80-an belum dilandasi oleh aturan kebijakan formal yang terandalkan untuk seluruh Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak terhadap keberadaan pranata dan praksis pendidikan itu sendiri.

Memang, segera setelah Perang Kemerdekaan, telah diadakan suatu undang-undang, yaitu UU no. 4 tahun 1950 yang mengatur Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah di Wilayah Republik Indonesia, yang pada waktu itu hanya merupakan sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Undang-undang tersebut kemudian dinyatakan berlaku bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditetapkan melalui UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Namun, undang tersebut terlalu terbatas ruang lingkup pengaturannya, sehingga belum dapat dianggap sebagai undang-undang pengatur perusahaan dan penyelenggaraan 'satu sistem pengajaran nasional' yang sekarang lebih layak disebut 'satu sistem pendidikan nasional' (Fuad Hasan, 1988).

Sementara itu keberadaan dan pemberlakuan suatu undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional di seluruh Indonesia amatlah penting, mendasar dan strategis. Arah pemikiran ini dilandasi oleh asumsi, bahwa aturan tentang pendidikan nasional berimplikasi tidak hanya bagi pranata pendidikan, melainkan juga bagi kelangsungan pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pernyataan lain, keutuhan bangsa yang majemuk dapat menyatu melalui suatu ikatan sistem pendidikan nasional yang berwawasan kebangsaan Indonesia.

Melalui pendidikan, nilai-nilai wawasan kebangsaan Indonesia akan tumbuh kembang pada diri setiap peserta didik secara intensional dan mengarah kepada konteks kehidupan yang akan datang. Wawasan kebangsaan itu sendiri memang kontekstual, sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, sehingga dapat disesuaikan dengan setiap konteks zaman.

Sektor pendidikan sebagai bagian dari pembangunan bangsa telah menekankan pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia Indonesia yang utuh. Salah satu ciri manusia yang utuh atau bermutu itu adalah memiliki rasa tanggung jawab kebangsaan. Manusia yang bertanggung jawab kebangsaan dengan sendirinya berwawasan kebangsaan. Karena itu menempatkan pendidikan berwawasan kebangsaan sebagai bagian terpadu dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan suatu keniscayaan.

Dengan memperhatikan secara seksama atas dokumen kebijakan pendidikan, disertai upaya kritis atas pelbagai peristiwa bangsa dan membuka kesadaran intelektual ke arah kehidupan berbangsa seluruh rakyat Indonesia di masa depan, maka setiap kebijakan pendidikan yang diamandemen dan atau dilahirkan, secara inklusif mesti mengintegrasikan pembinaan bangsa melalui pendidikan yang berwawasan kebangsaan.

2. Perspektif Aspirasi Masyarakat

Penting kebijakan pendidikan berwawasan kebangsaan terintegrasi dalam seluruh kebijakan tentang sistem pendidikan nasional yang mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih bermutu tidak diorientasikan kepada masa lalu, melainkan kepada nasib kehidupan seluruh rakyat sebagai bangsa pada masa kini dan ke depan, sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Artinya, jika Negara Kesatuan Republik Indonesia diinginkan tetap serta mampu bersaing dalam percaturan dunia maka pembinaan paham, rasa dan semangat kebangsaan seyogyanya dijadikan dimensi esensial dari sistem pendidikan nasional.

Pernyataan di atas dikemukakan berdasarkan atas latar belakang pentingnya pendidikan berwawasan kebangsaan menurut fakta empirik berupa aspirasi masyarakat di 12 propinsi yang dijadikan sampel studi. Pada intinya mereka menyatakan, bahwa pendidikan berwawasan kebangsaan itu sangatlah penting, mengingat hal sebagai berikut.

- (1) Keragaman dimensi kehidupan bangsa Indonesia yang disebut Bhineka itu merupakan kenyataan yang potensial dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri secara intelijen. Kesalahan dalam pembinaan dan cara mensyukuri kebhinekaan, akan berakibat pada keterpurukan bangsa secara keseluruhan, dan tidak mungkin dapat bangkit dalam satu lintas generasi;
- (2) Gejala disintegrasi bangsa yang kerap terjadi merupakan bukti dari adanya kesalahan kebijakan dan manajemen kehidupan bangsa yang bhineka. Artinya bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika hanya menghidupkan ke-Ikaan dalam pengertian tertentu, sementara realisasi kebijakan lebih mengarah pada represi atas kebhinekaan. Implikasi lebih lanjut dari pernyataan ini adalah kebhinekaan yang tersebar di setiap daerah seluruh Indonesia harus dijadikan modal dasar yang sesungguhnya demi mencapai kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemahaman yang tidak tepat tentang makna reformasi, otonomi daerah dan demokrasi, menjadi salah satu pemicu disintegrasi bangsa. Dalam kenyataannya di dunia pendidikan, gejala seperti ini dapat dieliminasi melalui praksis pendidikan yang memadukan wawasan kebangsaan, walaupun tidak berangkat dari konsep kebijakan yang faktual.

Kendati aspirasi masyarakat tentang rumusan pendidikan berwawasan kebangsaan di berbagai propinsi seakan beragam, mereka berharap banyak untuk ditemukan suatu benang merah dalam bentuk rumusan yang lebih dapat diimplementasikan, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah secara khas. Dengan demikian kebijakan tentang pendidikan berwawasan kebangsaan mesti berjenjang baik dari tingkat pusat sebagai kendali, maupun pada tingkat daerah yang bersifat koordinasi implementatif. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa daerah pun bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, karena hakekat dari bangsa Indonesia adalah kebhinekaan yang tersebar di seluruh Nusantara.

3. *Kondisi objektif lembaga pendidikan*

Dengan mencermati seluruh lembaga pendidikan (SLTP) negeri dan swasta yang dijadikan sampel studi, tampak bahwa pendidikan berwawasan kebangsaan tengah berlangsung walaupun tanpa disadari oleh pedoman penyelenggaraan serta program tersendiri. Semua sekolah menyelenggarakan program pendidikan berwawasan kebangsaan disesuaikan dengan kebijakan operasional masing-masing pimpinan sekolah. Selanjutnya kebijakan itu lebih dioperasionalkan dan disesuaikan dengan waktu yang tersedia di antara program kurikuler dan ekstra kurikuler yang ada.

Di lembaga pendidikan yang dijadikan sampel studi telah tercipta suatu interaksi yang baik antar siswa, antara siswa dengan guru maupun antar guru dengan staf sekolah yang lain dari berbagai latar belakang etnik. Interaksi yang dinamis tersebut tanpa dilatarbelakangi oleh sentimen kesukuan, perbedaan agama, asal-usul, maupun adat istiadat. Justru kehidupan yang Bhineka ternyata dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan pendidikan. Suasana saling menghargai, tenggang rasa, solidaritas sosial, pemahaman kebangsaan, rasa persatuan dan semangat untuk membanggakan ke-Indonesiaan dapat tumbuh subur di lingkungan pendidikan.

Namun, sebaliknya di luar lingkungan lembaga pendidikan banyak peristiwa yang kontradiktif, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga terdidik untuk mencontoh peristiwa di lingkungan luar. Percontohan warga sekolah seperti itu mesti dihindari, dikarenakan bertentangan dengan sifat pendidikan itu sendiri yang normatif dan positif. Peristiwa kontradiktif antar apapun yang berada di luar lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai media pendidikan yang langsung bersentuhan secara psikologis; akan dalam penggunaannya diperlukan sikap kritis dari kalangan pendidik, agar dihasilkan pengaruh positif terhadap perkembangan pribadi setiap peserta didik.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan dalam kerangka pembinaan wawasan kebangsaan Indonesia perlu bertitiktolak dari pedoman yang terandalkan, sehingga interaksi yang dinamis berlangsung atas dasar konsep penyelenggaraan yang jelas. Arah lebih jauh dari kondisi lembaga pendidikan seperti itu adalah tercapainya ketahanan lembaga pendidikan dari berbagai inspirasi dan pengaruh yang mengganggu stabilitas kebangsaan.

4. *Kecenderungan wawasan kebangsaan guru dan siswa SLTP*

Guru sebagai tenaga kependidikan berperan sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis di tempat tugasnya. Fakta empirik menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan guru SLTP berada tataran tingkat tinggi, baik untuk aspek paham, rasa maupun semangat kebangsaan. Artinya, para guru telah mempribadikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Hal tersebut merupakan modal dasar pendidikan yang sangat berharga, terutama apabila guru dipandang sebagai subjek yang mesti di teladani oleh peserta didik. Namun, pada sisi lain para guru cenderung menampakkan kekurang terampilan di dalam mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan ke dalam mata-mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena diperlukan

suatu program peningkatan profesionalitas para guru yang senafas dengan pendidikan berwawasan kebangsaan. Hal ini dimungkinkan apabila pendidikan berwawasan kebangsaan tidak dijadikan satu mata pelajaran khusus yang terpisah dari kurikulum.

Pembahasan

Fakta empirik juga menunjukkan, bahwa tidak terdapat perbedaan wawasan kebangsaan antara guru keturunan dengan nonketurunan. Fakta tersebut menyiratkan, bahwa di kalangan pendidik telah tumbuh daya tanggap atau "strategi formal" untuk menghadapi setiap pernyataan yang mengarah kepada penyingkapan wawasan kebangsaannya. Namun hal ini dapat berarti bahwa instrumen atau alat pengungkap data tidak terandalkan, padahal hasil perhitungan empirik menunjukkan sebaliknya; atau tingkat validitas dan reliabilitas instrumen dapat diandalkan, sehingga instrumen layak untuk digunakan;

Kalangan pendidik yang dijadikan sampel studi merupakan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajarkan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan kebangsaan, bahkan mereka menjadi teladan dalam berinteraksi, baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat dan pimpinan sekolah. Oleh karena itu dipandang wajar, apabila di antara para guru yang berbeda etnik tidak terdapat perbedaan dalam hal wawasan kebangsaannya;

Secara objektif para guru dilahirkan, dibesarkan, memasuki lembaga pendidikan dan bekerja sebagai tenaga pengajar atau pendidikan di wilayah Negara Kesatuan RI. Mereka telah menghayati perjalanan sejarah bangsa, falsafah negara, dan menerima kondisi geografis Indonesia yang sudah merdeka. Kondisi penghayatan tersebut begitu internal dalam dirinya, sehingga berpengaruh terhadap pelakunya, termasuk saat harus merespons setiap pernyataan yang menyingkap wawasan kebangsaan.

Pada sisi lain adalah siswa. Mereka menunjukkan wawasan kebangsaan pada tataran sedang, baik pada aspek paham, rasa maupun semangat kebangsaan. Artinya, mereka dalam berinteraksi secara dinamis antar etnik di sekolahnya belum mencapai tataran yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) Aspirasi orang tentang kesukuan yang eksklusif; (2) Peristiwa-peristiwa konflik antar etnik di lingkungan masyarakat kerap kali menyudutkan salah satu etnik atau unsur bangsa; dan (3) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan yang belum terprogram.

Oleh karena itu diperlukan suatu program pendidikan pada tingkat lembaga pendidikan yang memadukan antara dimensi akademik dengan dimensi kebangsaan. Program pendidikan yang dimaksud bertitiktolak dari suatu pedoman yang dapat dijabarkan dan disesuaikan dengan kondisi khas daerah masing-masing. Adapun pedoman pendidikan berwawasan kebangsaan yang ideal merupakan perpaduan antara fakta empirik dan lapangan, pemikiran teoretik pakar, dengan hasil analisis produk kebijakan. Pedoman yang memadukan hal-hal tersebut lebih komprehensif dan terandalkan, apabila didasarkan atas hasil penelitian.

Kesimpulan dan Saran

Studi kebijakan tentang pendidikan berwawasan kebangsaan diselenggarakan dalam bentuk pemaduan analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen produk kebijakan di bidang pendidikan dengan penyingkapan dan penganalisisan data lapangan dari 12 propinsi di Indonesia. Hasil pemaduan analisis menggambarkan, bahwa pendidikan berwawasan kebangsaan belum dinyatakan secara eksplisit dalam produk kebijakan tentang sistem pendidikan nasional; sehingga implementasi kebijakan tersebut pada tataran praksis pendidikan tidak terarah sebagaimana yang diharapkan.

SLTP Negeri dan Swasta pada 12 propinsi umumnya menyelenggarakan program pendidikan berwawasan kebangsaan tanpa berpijak pada suatu pedoman yang komprehensif dan terandalkan, sehingga dalam kenyataannya terintegrasi dalam kegiatan intra dan ekstra-kurikuler secara semu.

Anggota masyarakat di 12 propinsi menyepakati akan pentingnya pendidikan berwawasan kebangsaan yang terintegrasi dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang lebih bermutu melalui sektor pendidikan. Di samping itu, sektor pendidikan sudah selayaknya dijadikan prioritas dalam rangka membangun tatana kehidupan bangsa Indonesia yang lebih bermutu untuk masa kini dan masa depan.

Para pembina dan penyelenggara pendidikan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan berwawasan kebangsaan yang menumbuhkembangkan aspek dan nilai-nilai paham, rasa dan semangat kebangsaan Indonesia. Untuk kepentingan praktisi yang terarah, mereka mengusulkan agar pemerinyah pusat mengeluarkan kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan; sedangkan pemerintah daerah dan pihak dinas pendidikan berhak menjabarkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi daerah, tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Para guru menunjukkan wawasan kebangsaan yang tinggi, sehingga kondisi demikian dapat dijadikan fasilitas manusiawi yang mendukung secara konstruktif bagi praksis pendidikan di tempat tugas masing-masing. Namun, peserta didik menunjukkan wawasan kebangsaan pada tataran sedang yang berarti pendidikan yang terselenggara dan potensi siswa belum optimal. Agar diperoleh optimalisasi pada segi penyelenggaraan dan aktualisasi potensi, diperlukan stimulasi yang meningkatkan kompetensi profesional para guru sebagai tenaga kependidikan yang sanggup mengintegrasikan antara substansi akademik dengan substansi pendidikan berwawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil, pembahasan, kesimpulan dan seminar studi kebijakan tentang pendidikan berwawasan kebangsaan, maka rekomendasi dapat dirumuskan untuk kepentingan: (1) perubahan kebijakan pendidikan, (2) implementasi kebijakan, (3) peningkatan kompetensi profesional tenaga kependidikan dan, (4) penelitian lanjutan.

I. Rekomendasi untuk perubahan kebijakan

Kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional hendaknya menyatakan secara eksplisit bahwa pendidikan berwawasan kebangsaan merupakan bagian yang integral dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan tersebut, pemerintah

pusat melalui departemen pendidikan nasional perlu mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan. Kebijakan yang dimaksud merupakan produk yang dapat diandalkan, dikarenakan bertitik tolak dari kajian yang komprehensif dan terpadu baik dalam bentuk analisis kebijakan, perspektif pemikiran pakar maupun studi lapangan.

2. *Rekomendasi untuk implementasi kebijakan*

Studi ini telah menghasilkan pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan untuk tingkat SLTP. Pedoman tersebut didasarkan atas kajian produk kebijakan dan analisis data dari lapangan. Dengan mempertimbangkan kekhasan lembaga pendidikan dan kondisi daerah di setiap propinsi, tampaknya pedoman tersebut dapat dijadikan rujukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan. Hal ini direkomendasikan mengingat kandungan buku pedoman yang mencakup dasar pemikiran, pengertian, tujuan dan fungsi, nilai-nilai yang dikembangkan, strategi dan program kegiatan serta penilaian pendidikan berwawasan kebangsaan.

3. *Rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan*

tenaga kependidikan dalam hal ini terbatas pada kepala sekolah dan guru SLTP. Kepala sekolah tampaknya perlu dibekali dengan kompetensi dalam mengelola pendidikan yang berwawasan kebangsaan secara terpadu dengan program pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk kepentingan tersebut perlu dirancang suatu program pelatihan profesional yang memuat substansi: (1) dasar pemikiran, (2) pengertian, (3) tujuan dan fungsi, (4) nilai-nilai wawasan kebangsaan, (5) strategi dan program, (6) sistem penilaian kegiatan pendidikan berwawasan kebangsaan.

Sebelum melangkah kepada perancangan dan penyelenggaraan pelatihan, tampaknya perlu diadakan sosialisasi pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan secara nasional, disesuaikan kesediaan serta kemampuan daerah. Tenaga kependidikan atau guru mata pelajaran perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan di sekolah. Untuk hal itu mereka perlu diberi stimulasi profesional berupa program pelatihan yang menumbuhkan kemampuan mengintegrasikan antara materi pelajaran yang bersifat akademik dengan wawasan kebangsaan Indonesia pada diri peserta didik.

4. *Rekomendasi penelitian lanjutan*

Penelitian terbatas pada pengungkapan fakta empirik tentang kebijakan pendidikan berwawasan kebangsaan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan yang melibatkan 12 daerah sampel. Penelitian telah menghasilkan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan untuk tingkat SLTP dan sederajat. Untuk memperoleh gambaran tentang validitas eksternal atas hasil penelitian ini, maka penelitian-penelitian selanjutnya dapat bertemakan antara lain sebagai berikut: (1) Tema tentang potensi keberagaman etnik dan kontribusinya terhadap implementasi kebijakan daerah; (2) Uji coba program keterampilan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda bagi siswa SLTP; (3)

Studi banding tentang pendidikan berwawasan kebangsaan di kawasan Asia Pasifik; (4) Studi pengembangan model sekolah penyelenggara pendidikan wawasan kebangsaan; (5) Uji coba pedoman penyelenggaraan pendidikan berwawasan kebangsaan di tingkat SLTP secara nasional.

Daftar Rujukan

Hasan, Fuad. (1988). Penjelasan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional. (*Pidato Mendikbud RI di Depan Sidang DPR RI, tanggal 29 Juni 1988*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV. Eko Jaya.

Undang-undang RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional